

NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 22 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Amien Rais Datangi KPK,

Tagih Pelaporan Gibran

JAKARTA - Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais bersama sejumlah orang menyamangi gedung KPK siang ini. Ternyata mereka ingin bertemu dengan pemimpin KPK.

"Saya, kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK, pimpinan, bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan ketemu aja nggak punya nyali," kata Rizal di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (21/8).

Rizal mengaku datang untuk mempertanyakan proses laporan dugaan ko-

rupsi dengan terlapor Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka dan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep. Laporan itu dilaporkan oleh dosen UNJ, Ubedillah Badrun, pada Januari 2022.

"Tapi niat baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi kesombongan birokrasi. KPK ini nggak berani ngadepin yang kuat. Itu kenapa Ubeid (Ubedillah Badrun) setahun lalu datang ke sini minta supaya dituntasin kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaesang," jelas Rizal.

Ubedillah Badrun selaku pelapor juga hadir dalam rombongan Amien Rais dan Rizal Ramli ke KPK siang ini. Dia mengaku ada bukti baru terkait laporannya yang ingin disampaikan kepada pimpinan KPK.

"Kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK, tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satu pun yang berani ketemu kita," katanya.

Amien dan Rizal menyoroti penegakan kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi.



Amien menilai ada tren naiknya kasus korupsi saat ini.

"Pengamatan saya menyimpulkan bahwa korupsi zaman Jokowi makin menusuk ke dalam. Rumah Jokowi itu bersemayam korupsi yang luar biasa. Enough is enough. We have to do something," ujar Amien.

Laporan terhadap dua putra Jokowi itu sudah diarsipkan KPK. Alasannya, pelapor melaporkan Gibran dan Kaesang terkait dugaan perbuatan saat keduanya bukan penyelenggara negara.

"Jadi, pada tanggal 10 Januari 2022, KPK memang menerima laporan dugaan tindak pidana

korupsi dan/atau TPPU, terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup-grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan.

"Jadi sesungguhnya, yang dilaporkan, asumsinya adalah ini sama-sama sebelum menjadi pejabat negara," jelasnya.

Dia mengatakan KPK telah melakukan verifikasi kepada pelapor. Ghufron menyebutkan Ubedillah tidak mempunyai uraian fakta hingga data pendukung terkait laporannya ke KPK. Jadi, laporan itu menjadi tidak jelas. (dtk/muz)